

BAB I

PENDAHULUAN

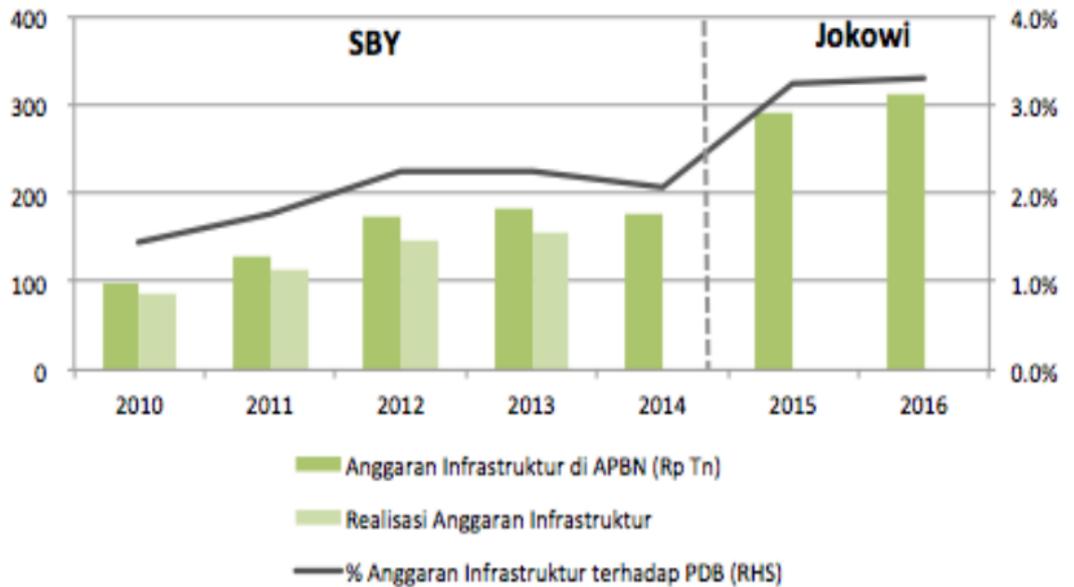
1.1 Latar Belakang

ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. ACFTA mulai berlaku pada tahun 2010 dengan tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota ASEAN dan China. Perjanjian ini mencakup penghapusan atau penurunan tarif impor dan ekspor, serta pengurangan hambatan non-tarif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini (Sari & Suhadak, 2017).

Bagi Indonesia, ACFTA membawa peluang besar dalam meningkatkan daya saing produk ekspor serta menarik investasi asing langsung (FDI). Dengan penghapusan tarif dan hambatan perdagangan, Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar China yang besar. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume perdagangan Indonesia-China sejak implementasi ACFTA. Selain itu, FDI dari China ke Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat, mencerminkan kepercayaan investor China terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pasar Indonesia (Sari & Suhadak, 2017).

Implementasi ACFTA oleh Indonesia mencakup beberapa langkah penting. Pertama, penghapusan atau penurunan tarif impor dan ekspor untuk produk-produk dari dan ke China. Kedua, pengurangan hambatan non-tarif seperti regulasi teknis yang kompleks dan prosedur bea cukai yang berbelit. Selain itu, Indonesia juga telah menyederhanakan prosedur investasi dan menawarkan berbagai insentif kepada investor asing, khususnya dari China, untuk menarik lebih banyak FDI. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan ACFTA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional (Kemendag, 2019).

Selain itu, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi asing, termasuk dari Tiongkok, sehingga mendorong lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Perusahaan Tiongkok telah meningkatkan investasi mereka di Indonesia sebagai hasil dari penurunan hambatan tarif dan non-tarif, peningkatan kepastian hukum, dan iklim investasi yang lebih menarik. Selain meningkatkan infrastruktur fisik, investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Jadi, dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke era Joko Widodo, proyek infrastruktur yang mendapatkan FDI dari Tiongkok telah berkembang pesat. Ini menunjukkan peran penting kerjasama bilateral dan kebijakan pro-investasi dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.



Grafik 1.1 Grafik Perkembangan anggaran proyek infrastruktur era Presiden Joko Widodo dan Sebelumnya

Sumber: Kemenkeu, BI9

Sejak terpilih sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik lebih banyak investasi asing (Kemendag, 2019).

Terjadi perubahan besar dalam cara melihat pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Joko Widodo dari 2014 hingga sekarang. Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu hal utama

yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pro-investasi dan penyederhanaan regulasi telah meningkatkan lingkungan investasi. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi salah satu mitra pembangunan infrastruktur utama Indonesia. Pada masa Joko Widodo, beberapa proyek infrastruktur besar yang mendapatkan investasi Tiongkok termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC), yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang melibatkan Tiongkok. Bandara, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya juga mendapatkan investasi dari Tiongkok untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Investor Tiongkok juga memberikan dana untuk pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya, yang mempercepat pembangunan yang sebelumnya berjalan (Marantika, 2017).

Presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam upaya mewujudkan konsep poros maritim dunia dan inisiatif jalan sutra maritim abad ke-21. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan konektivitas maritim di wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan investasi. Proyek mega seperti Kereta Cepat Indonesia Tiongkok (KCIC) adalah contohnya. Ini merupakan pelaksanaan sejumlah perjanjian yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo selama kepemimpinannya, terutama dari tahun 2014 hingga 2024. (Marantika, 2017)

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integrasi ekonomi ASEAN dan penguatan kerja sama dengan Tiongkok.

Studi periode ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dan taktik pemerintah berfungsi dalam konteks globalisasi ekonomi dan integrasi regional. Penelitian di era Presiden Joko Widodo dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan integrasi regional berdampak pada perkembangan FDI di Indonesia, serta memberikan ruangan yang lebih akurat untuk menarik kesimpulan tentang dampak ACFTA karena periode 2014–2024 memberikan waktu yang cukup panjang untuk menganalisis tren dan pola FDI. (Marantika, 2017)

Menurut (ASEAN-China. Org, 2012) ACFTA memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Implementasi ACFTA sejak tahun 2010 menurut Kemendag RI yang telah membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya. Beberapa aspek kunci dari ACFTA yang relevan dalam konteks ini meliputi: (I) Penghapusan atau Pengurangan Tarif: ACFTA bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tarif pada berbagai barang yang diperdagangkan antara negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Tiongkok. Ini membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Tiongkok dan ASEAN, serta membuat produk dari negara-negara ini lebih murah di pasar Indonesia. (II) Kemudahan Investasi: Perjanjian ini juga mencakup ketentuan yang memfasilitasi arus investasi antara negara-negara anggota. Ini mencakup penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan perlindungan bagi investor, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. (III) Peningkatan Akses Pasar:

Dengan ACFTA, eksportir dan investor dari Indonesia mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar regional dan menarik lebih banyak investasi asing. (IV) Standar dan Regulasi Bersama: ACFTA berusaha untuk menyelaraskan standar dan regulasi antara negara-negara anggota untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Hal ini dapat membantu mengurangi hambatan non-tarif dan meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi.

Penelitian oleh Li, Qiaomin et al (2016) mengungkapkan bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) merupakan langkah signifikan dalam mengintegrasikan ekonomi Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Mereka menunjukkan bahwa meskipun analisis FTA umumnya lebih fokus pada dampak terhadap perdagangan, hubungan erat antara perdagangan dan investasi juga mengindikasikan bahwa FTA dapat berdampak besar pada Investasi Asing Langsung (FDI). Menurut studi ini, FTA dapat mendorong FDI melalui dua mekanisme utama: memperluas pasar dan menciptakan fragmentasi vertikal, tetapi juga berpotensi mengurangi FDI melalui rasionalisasi pabrik. Penelitian ini menggunakan model ekonometrik yang mempertimbangkan pengaruh jaringan produksi di Asia Timur untuk mengevaluasi dampak ACFTA terhadap aliran FDI. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa ACFTA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aliran FDI. Lebih jauh, kajian literatur teoretis terkait investasi

asing menekankan bahwa manfaat dari peningkatan FDI akan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota ACFTA.

Penelitian sebelumnya oleh Li, Qiaomin & Maani, Sholeh (2018) menunjukkan bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik Investasi Asing Langsung (FDI). Mereka mengeksplorasi bagaimana FTA mempengaruhi FDI dan menemukan dua efek utama yang memengaruhi FDI: efek perluasan pasar dan efek fragmentasi vertikal. Dengan menggunakan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) sebagai studi kasus, penelitian ini menganalisis kedua efek tersebut pada sektor-sektor industri manufaktur di Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACFTA menghasilkan kedua efek tersebut. Efek perluasan pasar mendukung sektor-sektor dengan daya saing internasional dalam menarik lebih banyak FDI yang mencari pasar, sedangkan efek fragmentasi vertikal mendorong FDI vertikal ke sektor-sektor yang terlibat dalam perdagangan barang setengah jadi. Temuan ini memberikan wawasan kebijakan bahwa pemilihan mitra FTA sangat penting. FTA dengan pasar besar dapat menarik FDI yang mencari pasar, sedangkan FTA dengan negara-negara dalam rantai nilai produksi yang sama dapat menarik FDI vertikal.

Dalam penelitiannya, Denq Qianfang, E. M. Karpenka, dan K. V. Shestakova (2021) menganalisis tren Investasi Asing Langsung (FDI) dari ASEAN ke Tiongkok dalam lima tahun terakhir. Mereka menemukan bahwa Guangxi belum memanfaatkan sepenuhnya potensi investasi ASEAN, dengan sebagian besar FDI

masih berasal dari Singapura dan Thailand. Untuk meningkatkan FDI, pemerintah Guangxi perlu memperluas sasaran investasi, mengatasi kendala, memperdalam kerja sama dengan Singapura dan Thailand, serta meningkatkan infrastruktur dan platform bisnis. Langkah-langkah ini akan membantu Guangxi menarik lebih banyak FDI dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial berkelanjutan.

Penelitian Astatiani (2023) mengenai dampak pelaksanaan ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) menunjukkan bahwa sejak ACFTA diterapkan, arus FDI dari China ke Indonesia meningkat. Namun, FDI dari negara-negara di luar kawasan ACFTA mengalami penurunan signifikan. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kawasan perdagangan bebas seperti ACFTA mempengaruhi arus FDI, dengan negara asal FDI di luar kawasan memberikan dampak negatif pada investasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan FDI di Indonesia termasuk PDB negara asal, perjanjian perdagangan preferensial, tingkat suku bunga riil, inflasi, dan kestabilan politik. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan berdampak negatif karena investasi lebih banyak mengalir ke sektor dengan hambatan perdagangan tinggi.

Banyak penelitian sebelumnya menitikberatkan pada dampak ACFTA terhadap implikasi arus perdagangan barang dan jasa, dan pengaruhnya terhadap FDI di wilayah ASEAN dan efektifitas pemanfaatan ACFTA bagi pemerintah di China. Namun penelitian lebih berfokus pada implementasi Perjanjian Perdagangan

Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) secara khusus di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan terhadap FDI selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berlangsung dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan khususnya di Indonesia tentang cara mengoptimalkan ACFTA untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Urgensi untuk meneliti implementasi ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024 terletak pada kebutuhan kritis untuk menilai efektivitas dan dampak perjanjian perdagangan ini dalam jangka waktu yang signifikan. Sebagai salah satu mitra dagang dan sumber investasi terbesar Indonesia, Tiongkok memainkan peran penting dalam lanskap investasi Indonesia. Memahami bagaimana ACFTA mempengaruhi dinamika FDI di Indonesia sangat penting bagi para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai kebijakan perdagangan, investasi, dan kemitraan strategis. Selain itu, dengan lanskap perekonomian global yang berkembang pesat, analisis implementasi ACFTA dapat memberikan wawasan berharga dalam meningkatkan daya saing Indonesia dan memaksimalkan manfaat perjanjian perdagangan ini di masa depan. Menilai dampak ACFTA terhadap FDI juga penting untuk memahami sejauh mana perjanjian ini mampu menarik investasi asing yang berkualitas dan berkelanjutan, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memahami implementasi kebijakan perdagangan internasional terhadap investasi asing, penting untuk mengevaluasi bagaimana perjanjian-perjanjian besar mempengaruhi ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, **Bagaimana Implementasi Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia selama periode Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2024?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan dampaknya terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Tiongkok di Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ACFTA

diimplementasikan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi arus FDI dari China ke Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Free Trade Area* (FTA)

FTA adalah kumpulan negara yang melonggarkan dan bahkan membebaskan kontrol harga melalui tarif dan kuota satu sama lain. Ini memungkinkan negara-negara untuk berkonsentrasi pada keunggulan komparatif mereka dan membuat produk yang unggul. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan tanpa tarif atau penghalang di luar batas umum, seperti batas geografis. FTA telah diperluas untuk mencakup bukan hanya barang dan jasa tetapi juga hak atas investasi dan kekayaan intelektual (Mukunoki, 2005).

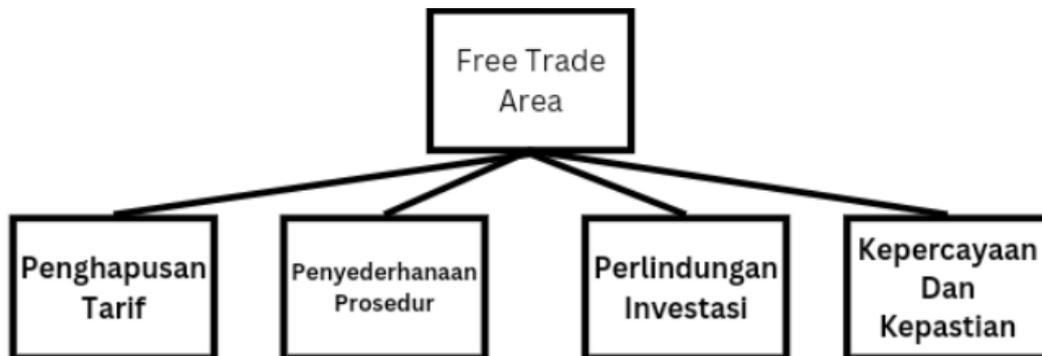
Dalam konteks *Foreign Direct Investment* (FDI), *Free Trade Area* (FTA) dapat menjadi instrumen yang penting. FTA bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antara negara-negara anggota, termasuk hambatan untuk investasi asing. Pertama penghapusan tarif, FTA biasanya mencakup penghapusan tarif impor antara negara-negara anggota. Hal ini dapat membuat produk lebih murah bagi investor asing yang ingin memasuki pasar di negara-negara tersebut Khaldun (2024).

Kedua penyederhanaan prosedur, FTA sering kali mencakup upaya untuk menyederhanakan prosedur perdagangan, termasuk prosedur untuk investasi asing. Misalnya, FTA dapat mempercepat proses perizinan atau mengurangi birokrasi yang diperlukan untuk berinvestasi di negara-negara anggota (Khaldun, 2022).

Selanjutnya perlindungan investasi, FTA juga dapat mencakup ketentuan perlindungan investasi yang memberikan jaminan kepada investor asing terhadap risiko ekspropriasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil dari pemerintah negara tuan rumah. Menurut Juliana (2022), FTA melindungi akses pasar dan menciptakan lingkungan operasional yang lebih dapat diprediksi dengan akses pasar yang lebih luas dan peningkatan ambang batas ekuitas asing di enam sektor jasa, serta perlindungan bagi investor dan investasi. Ini menghasilkan lingkungan yang lebih transparan, fasilitatif, dan aman bagi investor.

Yang terakhir kepercayaan dan kepastian, dengan mengikuti FTA, negara-negara anggota menunjukkan komitmen mereka untuk memperdalam integrasi ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan memberikan kepastian tentang lingkungan investasi di negara-negara anggota. Tujuan utama dari FTA adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dengan memastikan adanya kepastian bagi investasi mereka (Nurtresna et al., 2024).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan skema di atas, sintesis pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) selama periode 2014 hingga 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap arus *Foreign Direct Investment* (FDI) dari China ke Indonesia. *Free Trade Area* bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan antara negara-negara anggota, termasuk berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh investasi asing, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek *Free Trade Area* adalah penghapusan tarif impor antara negara anggota, yang berpotensi menurunkan biaya produk bagi investor asing. FTA berfokus pada penghapusan tarif untuk jalur ekspor Indonesia. Selanjutnya, *Free Trade Area* sering kali menyederhanakan prosedur perdagangan dan investasi, termasuk mempercepat perizinan serta mengurangi birokrasi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyederhanaan ini melalui *Omnibus Law* setelah berlakunya FTA. Selain itu, *Free Trade Area* sering mencakup perlindungan investasi terhadap risiko seperti ekspropriasi dan perlakuan tidak adil.

Free Trade Area melindungi akses pasar dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan serta aman, dengan peningkatan ambang batas ekuitas asing di enam sektor jasa serta perlindungan bagi investor. Terakhir, *Free Trade Area* meningkatkan kepercayaan investor asing dan memberikan kepastian investasi dengan menunjukkan komitmen negara-negara anggota untuk integrasi ekonomi yang lebih dalam, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.

1.6 Asumsi/Argumen Utama

Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa Indonesia telah melakukan implementasi-implementasi kebijakan ACFTA sesuai dengan teori *Free Trade Area* (FTA). Asumsi ini didasarkan pada beberapa poin penting. Pertama, Indonesia telah menghapus atau menurunkan tarif impor dan ekspor untuk produk-produk dari dan ke China. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral dan mengurangi biaya perdagangan, yang diharapkan dapat mendorong investasi asing langsung (FDI). Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi hambatan non-tarif seperti regulasi teknis yang kompleks, prosedur bea cukai yang berbelit, dan persyaratan administrasi lainnya. Kedua, Indonesia telah menyederhanakan prosedur investasi dan menawarkan insentif kepada investor asing, khususnya dari China, untuk menarik lebih banyak FDI. Insentif ini mencakup keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan perlindungan terhadap hak-hak investor. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur besar, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC), yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, sehingga

menarik lebih banyak investasi asing. Ketiga, dalam kerangka kerjasama ekonomi dan teknologi, Indonesia dan China telah menyepakati transfer teknologi dalam berbagai sektor. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas industri domestik Indonesia tetapi juga menarik investasi dengan menawarkan teknologi yang lebih maju. Selain itu, Indonesia telah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menyediakan fasilitas dan insentif khusus bagi investor, termasuk yang berasal dari China, untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Keempat, Indonesia telah melakukan reformasi hukum dan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini termasuk memperbarui undang-undang investasi, peraturan perburuhan, dan peraturan lainnya yang relevan dengan perdagangan dan investasi. Peningkatan perlindungan hukum bagi investor asing juga telah dilakukan untuk memberikan kepastian dan keamanan investasi di Indonesia. Sesuai dengan teori Free Trade Area, negara-negara yang berpartisipasi dalam FTA diharapkan untuk menghapus hambatan perdagangan internal mereka, sementara tetap mempertahankan kebijakan perdagangan eksternal masing-masing. Implementasi ACFTA oleh Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip ini melalui berbagai kebijakan dan reformasi yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral dengan China.

1.7 Metodologi Penulisan

1.7.1 Tipe Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut (Neuman, 2014), metode deskriptif adalah cara penelitian untuk memahami status sekelompok orang,

kondisi, atau objek dalam studi kasus tertentu. Menurut Mely G Tan (Koentjaraningrat, 1981), tujuan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang karakteristik individu, kelompok, keadaan, dan fenomena tertentu. Penulis akan menggunakan jenis penelitian yang disebut Penelitian Deskriptif Eksplanatif, yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis kata-kata (tertulis atau lisan) dan data tekstual yang diambil dari beberapa artikel penelitian dan referensi yang dapat ditemukan di Internet dari sumber yang dapat dipercaya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan fokus menganalisis implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terhadap perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2024. Kajian ini akan mengkaji tren dan pola FDI di Indonesia dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok selama periode tersebut, termasuk perubahan volume investasi, nilai, dan sektor-sektor yang menerima FDI.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mengumpulkan data dari Internet yang berupa *Research Paper* yang telah di publish di Internet atau dari perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur, untuk data dari Internet penulis akan mencari sumber yang kredibel agar data yang didapatkan dapat dikerjakan dengan baik. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis

mengumpulkan dan menggunakan data primer dengan metode wawancara dengan salah satu investor tiongkok di Indonesia, serta data sekunder dengan metode dokumentasi. Data primer merujuk pada data verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berhubungan dengan variabel yang diteliti (Sandu, 2015). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya (bukan diperoleh secara langsung dari narasumber). Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, laporan, dan sebagainya (Sandu, 2015).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan *qualitative analysis* yang merupakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada tulisan manusia yang direkam seperti manuskrip, rekaman suara, dan jurnal. Analisis konten menyelidiki artefak tertulis, lisan, dan visual ini tanpa secara eksplisit mengekstraksi data dari peserta. penulis juga akan menggunakan pendekatan Deduktif. Metode analisis ini digunakan oleh peneliti dan analis yang telah memiliki teori atau gagasan yang telah ditentukan sebelumnya tentang kemungkinan masukan dari populasi sampel. Pendekatan deduktif bertujuan untuk mengumpulkan data yang secara metodis dan akurat dapat mendukung suatu teori atau hipotesis.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan Skripsi ini secara keseluruhan lebih teratur dan dapat dipahami, maka perlu disajikan suatu sistem yang memberikan kerangka dan pedoman penulisan karya skripsi untuk kelulusan ini disajikan menurut sistem penulisan berikut :

BAB I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen penulis, dan struktur penulisan skripsi.

BAB II akan menyajikan data dan analisa implementasi *free trade area* melalui indikator penghapusan tarif, penyederhanaan prosedur dalam menerima FDI dari Tiongkok selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BAB III akan menyajikan data dan analisa implementasi *free trade area* melalui indikator perlindungan investasi serta kepercayaan dan kepastian dalam menerima FDI dari Tiongkok selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari semua penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dapat dibuat tentang masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan hasil penyelesaian penelitian adalah analisis yang objektif.